

IMPLEMENTASI INTERAKSI SOSIAL PADA KEMENAG OKI

Syarip

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ahmad Zainuri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Saipul Annur

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Social interaction is a fundamental process that shapes patterns of relationships, social structures, and meanings in society. In public organizations such as the Ministry of Religious Affairs (Kemenag), social interaction plays a crucial role not only as a means of communication and information exchange, but also as a mechanism for building coordination, trust, organizational culture, and achieving collective goals. This study examines the implementation of social interaction in the Ministry of Religious Affairs of Ogan Komering Ilir (OKI) Regency, a region with complex socio-religious diversity that reflects Indonesia's multiculturalism. Using a qualitative case study approach, this study describes how internal interactions among State Civil Apparatus (ASN) and external interactions with the community, including mass organizations and religious leaders, are implemented. The results reveal that the Ministry of Religious Affairs of OKI prioritizes a collaborative culture, intensive communication, and the development of human resources with character, which contribute to increasing service effectiveness, maintaining socio-religious harmony, and strengthening institutional legitimacy as a trusted entity. This study provides an in-depth understanding of how social interaction can be a crucial strategy in governance in the religious sector that is adaptive and responsive to local socio-cultural dynamics. These findings also suggest the importance of internalizing local wisdom values and religious moderation in managing diversity to create social harmony.

ABSTRAK

Interaksi sosial merupakan proses dasar yang membentuk pola hubungan, struktur sosial, dan makna dalam masyarakat. Dalam organisasi publik seperti Kementerian Agama (Kemenag), interaksi sosial berperan krusial tidak sekadar sebagai komunikasi pertukaran informasi, tetapi juga sebagai mekanisme membangun koordinasi, kepercayaan, budaya organisasi, dan pencapaian tujuan kolektif. Studi ini mengkaji implementasi interaksi sosial di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sebuah wilayah dengan keragaman sosial-keagamaan yang kompleks yang mencerminkan multikulturalisme Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini memaparkan bagaimana interaksi internal antar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan interaksi eksternal dengan masyarakat, termasuk ormas serta tokoh agama, dilaksanakan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kemenag OKI mengedepankan budaya kolaboratif, komunikasi intensif, dan pembinaan SDM berkarakter, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas layanan, pemeliharaan harmoni sosial-keagamaan, dan penguatan legitimasi kelembagaan sebagai bagian yang dipercaya oleh masyarakat. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana interaksi sosial dapat menjadi strategi penting dalam tata kelola pemerintahan bidang agama yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-kultural lokal. Temuan ini juga menyarankan pentingnya internalisasi nilai kearifan lokal dan

moderasi beragama dalam mengelola keragaman untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Keywords: Interaksi sosial, Kementerian Agama, Kemenag OKI, multikulturalisme, moderasi beragama, administrasi publik, harmoni sosial.

A. Pendahuluan

Interaksi sosial, sebagai proses fundamental dalam kehidupan manusia, merupakan fondasi bagi terbentuknya pola-pola hubungan, struktur sosial, dan makna dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks organisasi, interaksi sosial tidak hanya sekadar komunikasi pertukaran informasi, tetapi juga mekanisme untuk membangun koordinasi, kepercayaan, budaya organisasi, dan mencapai tujuan kolektif (Putnam & Nicotera, 2009). Pada organisasi publik seperti Kementerian Agama (Kemenag), dimensi interaksi sosial menjadi semakin kompleks dan krusial. Kemenag tidak hanya berfungsi sebagai sebuah birokrasi pemerintah yang tunduk pada peraturan dan prosedur standar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pembina dalam ranah kehidupan beragama yang sarat dengan nilai, emosi, dan identitas.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan merupakan miniatur Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang unik dan kompleks. Masyarakat OKI terdiri dari berbagai suku, dengan mayoritas Muslim yang kuat, serta terdapat komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha. Keragaman ini berpotensi menjadi kekayaan,

namun juga rentan terhadap gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks inilah, Kantor Kemenag Kabupaten OKI hadir sebagai institusi yang dituntut tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga lihai secara sosiologis dan kultural.

Wilayah ini mencerminkan sifat multikultural Indonesia, dengan populasi Muslim yang dominan di samping komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha yang signifikan (Prasojo & Pabbajah., 2020). Meskipun keragaman tersebut dapat menjadi aset budaya, keragaman tersebut juga membawa risiko inheren berupa gesekan sosial (Mubit., 2016). Kantor Urusan Agama (Kemenag) setempat memainkan peran penting dalam mengelola kompleksitas ini, yang tidak hanya membutuhkan kompetensi administratif tetapi juga pemahaman sosiologis dan budaya yang mendalam. Tantangan utamanya terletak pada transformasi potensi ketegangan sosial menjadi peluang untuk saling pengertian dan harmoni (Salman., 2023).

Teori interaksi sosial simbolik (Blumer, 1969) menekankan bahwa individu bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada sesuatu, dan makna tersebut diperoleh serta dimodifikasi melalui proses interaksi dengan orang lain. Perspektif ini relevan untuk

memahami bagaimana ASN Kemenag OKI memaknai tugasnya bukan hanya sebagai "pengelola administrasi", tetapi sebagai "pelayan umat" yang substansinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Zainuri, 2016). Selain itu sebagai "penjaga harmoni". Interaksi sosial yang intensif dengan masyarakat—mulai dari tokoh agama, ormas, hingga warga biasa—membentuk makna dan persepsi bersama tentang peran Kemenag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi interaksi sosial di Kemenag Kabupaten OKI, baik secara internal antar-ASN maupun secara eksternal dengan masyarakat. Fokus analisis meliputi bentuk-bentuk interaksi, serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi dan harmoni sosial-keagamaan di Kabupaten OKI. Dengan mengeksplorasi praktik-praktik nyata di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola pemerintahan di bidang agama yang lebih partisipatif dan responsif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial secara mendalam dan holistik dari perspektif partisipan (Creswell &

Poth, 2018). Studi kasus pada Kemenag Kabupaten OKI memungkinkan peneliti untuk memahami secara utuh konteks dan dinamika implementasi interaksi sosial di dalam organisasi tersebut. Metode ini mencakup beberapa kegiatan seperti pengumpulan data, penulisan, analisis, dan analisis bahan penelitian (Annur, 2018).

Sumber Primer: Diperoleh melalui: *Pertama*, Wawancara Mendalam, *Kedua*, Observasi Partisipan: Peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kemenag OKI, seperti rapat koordinasi internal, penyuluhan agama di desa, pelayanan pernikahan, dan forum silaturahmi antar tokoh agama. Sedangkan Sumber Sekunder: Meliputi dokumen-dokumen resmi seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kemenag OKI, arsip surat menyurat, berita di media lokal, dan postingan di media sosial resmi Kemenag OKI.

Teknik Analisis Data: Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles, Huberman, & Saldaña (2014), yang meliputi proses: *Pertama*, Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Menurut Kusyana., (2023), reduksi data adalah "proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan." Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang penelitian dan bertujuan untuk mempertajam, mengarahkan, dan

mengorganisasikan data yang terkait dengan fenomena penelitian. Lebih lanjut Supriadi, et al., (2021) menjelaskan bahwa reduksi data mencakup "menyingkirkan data yang tidak relevan dan menarik kesimpulan," sehingga informasi mentah lebih mudah dikelola dan bermanfaat secara analitis.

Kedua, Penyajian Data: Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi deskriptif untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Menurut Nurhaswinda Nurhaswinda dkk., (2025) bahwa penyajian data yang efektif meningkatkan pemahaman informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Berbagai bentuk penyajian seperti tabel, grafik, dan diagram masing-masing menawarkan keunggulan unik dalam menyampaikan informasi. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi format yang jelas dan mudah dipahami sehingga memungkinkan peneliti untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketiga, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menarik makna dari data yang disajikan, mencari pola, hubungan, dan proposisi yang dapat menjawab fokus penelitian. Kesimpulan divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Tujuan utamanya adalah untuk mendekati suatu fenomena dari berbagai perspektif, mengurangi potensi

bias, dan meningkatkan reliabilitas kesimpulan penelitian (Bachri., 2010.) Dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat mencapai interpretasi temuan mereka yang lebih komprehensif dan terpercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Konteks Sosial-Keagamaan Kabupaten OKI

Kabupaten OKI merupakan wilayah yang luas dengan geografi yang bervariasi, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan kawasan pesisir. Masyarakatnya dikenal sangat religius dengan tradisi Islam yang kuat, dicirikan oleh adanya pesantren-pesantren besar dan ormas-ormas Islam yang berpengaruh. Namun, keragaman internal dalam praktik keagamaan (misalnya antara penganut tradisi dan modernis) serta adanya minoritas non-Muslim menuntut pendekatan yang hati-hati. Nilai kearifan lokal seperti "*Melayat Pati Pati*" yang berarti sikap gotong royong dan kekerabatan yang erat, menjadi modal sosial (Putnam, 2000) yang sangat berharga bagi Kemenag OKI dalam membangun interaksi.

Secara ringkas, konteks Kabupaten OKI menghadirkan sebuah paradoks sekaligus peluang: sebuah masyarakat yang disatukan oleh religiositas Islam yang kuat, namun secara internal terfragmentasi oleh perbedaan mazhab dan agama. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Kemenag OKI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan birokratis-formal yang kaku. Keberhasilannya justru sangat

bergantung pada kemampuannya untuk menjadi institusi yang sosiologis dan kultural. Kunci strategisnya terletak pada kemampuan untuk mengaktifkan dan memanfaatkan modal sosial yang sudah ada, yaitu nilai *Melayat Pati Pati*. Dengan menjadikan nilai kekerabatan yang erat ini sebagai fondasi setiap interaksi—baik internal dengan ASN, eksternal dengan ormas dan pesantren, maupun dengan seluruh lapisan masyarakat—Kemenag OKI berhasil mentransformasikan dirinya dari sekadar "kantor pemerintah" menjadi "bagian dari keluarga besar masyarakat OKI".

Pendekatan humanis dan berbasis kearifan lokal inilah yang memungkinkannya untuk mengelola keragaman, meredam potensi konflik, dan pada akhirnya menjalankan fungsi pelayanan dan pembinaan dengan lebih efektif dan legitimasi yang tinggi. Bukti-bukti yang ada sangat mendukung klaim ini di berbagai konteks Indonesia. Zuhdi., (2018) menunjukkan bahwa kearifan lokal mengandung nilai-nilai inheren berupa saling pengertian dan dapat digunakan secara strategis untuk mencegah dan melokalisasi konflik. Lebih lanjut, Suherman & Sirajuddin., (2018) menekankan bahwa mengabaikan kearifan lokal berisiko menghilangkan kohesi komunitas dan meningkatkan ketegangan sosial.

Muhammad Sauki et al., (2020) memberikan bukti konkret efektivitas kearifan lokal, menunjukkan bagaimana lembaga adat dapat secara aktif menyelesaikan konflik komunitas

dengan memanfaatkan mekanisme resolusi konflik yang tertanam secara budaya. Pendekatan-pendekatan ini sangat berharga dalam lanskap sosial Indonesia yang beragam, menawarkan metode yang bernuansa dan non-koersif untuk menjaga keharmonisan sosial dan kredibilitas kelembagaan.

Implementasi Interaksi Sosial di Kemenag OKI

Interaksi internal menjadi prasyarat bagi terciptanya organisasi yang solid. Di Kemenag OKI, hal ini diwujudkan melalui: *Pertama*, Budaya Organisasi Kolaboratif: Berbeda dengan stereotip birokrasi yang kaku, Kemenag OKI membangun budaya "kekeluargaan birokratis". Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, sering dilakukan briefing singkat dan informal yang tidak hanya membahas tugas, tetapi juga menanyakan kabar dan kondisi rekan kerja. Seorang Kepala Seksi menyatakan, "*Kami di sini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Urusan pendidikan, haji, dan masyarakat itu saling berkait. Jika ada masalah di lapangan, kami langsung koordinasi, tidak perlu menunggu surat resmi*" (Wawancara, 15 Oktober 2025). Praktik ini sejalan dengan teori organisasi pembelajaran (Senge, 1990) yang menekankan pentingnya *shared vision* dan *team learning*.

Kedua, Komunikasi Vertikal dan Horizontal yang Intensif: Struktur birokrasi tidak menjadi penghalang komunikasi. Kepala Kemenag OKI menerapkan

kebijakan pintu terbuka (*open door policy*), memungkinkan staf junior untuk menyampaikan ide atau keluhan langsung. Selain itu, grup aplikasi percakapan seperti WhatsApp digunakan secara efektif untuk koordinasi cepat dan berbagi informasi, meminimalisir birokrasi yang berbelit (Trevino, Lengel, & Daft, 1987).

Ketiga, Pembinaan SDM ASN yang Berkarakter: Kemenag OKI secara rutin mengadakan pembinaan mental spiritual dan pelatihan teknis bagi ASN-nya. Pembinaan ini tidak hanya menekankan kompetensi profesional, tetapi juga integritas dan etika pelayanan. Seorang Penyuluh Agama menegaskan, "Kita adalah ujung tombak. Masyarakat tidak hanya lihat apa yang kita sampaikan, tapi lebih pada bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari" (Wawancara, 18 Oktober 2025). Hal ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai agama ke dalam etos kerja birokrasi.

Interaksi Sosial Eksternal: Strategi Menjangkau dan Melayani Umat

Interaksi eksternal adalah inti dari misi Kemenag. Implementasinya di OKI sangat beragam dan kontekstual: *Pertama, Pendekatan Link and Match dengan Ormas Keagamaan: Kemenag OKI tidak memposisikan diri sebagai "penguasa" tunggal, melainkan sebagai mitra strategis ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam program pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan keluarga sakinah,*

Kemenag sering menggandeng jaringan pesantren dan majelis taklim milik ormas. Seorang tokoh NU menyatakan, "Hubungan kami dengan Kemenag OKI sangat baik. Mereka sering meminta masukan dan kami diajak bekerja sama dalam program yang nyata untuk masyarakat" (Wawancara, 22 Oktober 2025). Kemitraan ini merupakan bentuk modal sosial "bridging" (menjembatani perbedaan) yang efektif (Putnam, 2000).

Secara ringkas, kemitraan Kemenag OKI dengan berbagai ormas Islam bukanlah sekadar kerjasama prosedural, melainkan sebuah strategi cerdas membangun "jembatan sosial" (*bridging social capital*). Dengan menjadi fasilitator dan integrator, Kemenag OKI berhasil: *Mentransendensi perbedaan afiliasi organisasi dan ideologi keagamaan di tingkat akar rumput. Menciptakan tata kelola pemerintahan bidang agama yang kolaboratif dan inklusif, di mana negara dan masyarakat sipil bekerja sama sebagai mitra setara. Mengoptimalkan sumber daya dan kredibilitas bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pelayanan kepada umat dan pemeliharaan harmoni sosial.*

Oleh karena itu, "*bridging*" yang efektif ini merupakan kunci sukses transformasi Kemenag OKI dari birokrasi yang berdiri di menara gading menjadi institusi yang terhubung secara organik dengan denyut nadi masyarakat yang beragam. Pendekatan ini merupakan praktik terbaik (*best*

practice) bagaimana negara dapat mengelola pluralitas dengan cerdas dengan memanfaatkan modal sosial yang sudah hidup dalam masyarakat.

Kedua, Mediasi dan Resolusi Konflik: Dalam beberapa kasus sengketa internal umat beragama, seperti perselisihan pengelolaan masjid atau perbedaan penafsiran, Kemenag OKI bertindak sebagai fasilitator netral. Mereka mengundang pihak-pihak yang berselisih untuk duduk bersama, mendengarkan keluhan masing-masing, dan mencari titik temu berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kearifan lokal. Pendekatan ini mirip dengan konsep *habitus* Pierre Bourdieu (1977), di mana Kemenag berusaha menciptakan "rasa permainan" (*feel for the game*) yang sama di antara pihak yang berseteru.

Ketiga, Layanan Publik yang Partisipatif dan Adaptif: Di bidang layanan, seperti pencatatan nikah atau informasi haji, Kemenag OKI aktif melakukan sosialisasi langsung ke kecamatan dan desa-desa terpencil (*go to community*). Mereka tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi menjemput bola. Pada momen-momen tertentu seperti hari raya, petugas layanan sering disediakan untuk melayani warga yang membutuhkan. Seorang warga menyampaikan, "Saya urus nikah anak di Kemenag, petugasnya ramah dan jelas penjelasannya. Bahkan dia kasih nomor HP-nya kalau ada yang perlu ditanyakan lagi" (Wawancara, 25 Oktober 2025). Interaksi semacam ini

membangun kepercayaan (*trust*) publik, yang merupakan elemen kunci bagi legitimasi pemerintah (Fukuyama, 1995.)

Dampak Implementasi Interaksi Sosial

Implementasi interaksi sosial yang komprehensif ini membawa dampak signifikan: *Pertama*, Peningkatan Efektivitas Layanan: Layanan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat karena adanya umpan balik langsung. Dengan demikian implementasi umpan balik langsung bukan hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik dan kontekstual, serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Kedua, Pemeliharaan Harmoni Sosial-Keagamaan: Konflik keagamaan dapat diredam dan dicegah sejak dini melalui komunikasi dan mediasi yang proaktif. Pendekatan ini menegaskan bahwa harmoni sosial tidak hanya sekedar nihil konflik, tetapi juga tercipta melalui kultur komunikasi yang terus membangun kepercayaan dan pengertian bersama. Dengan demikian, potensi konflik yang berkaitan dengan perbedaan paham, isu sosial, atau ketidakseimbangan informasi dapat diminimalisasi secara signifikan. Fokus pada mediasi dan komunikasi proaktif ini membantu stabilitas sosial,

menguatkan rasa kebersamaan, dan memastikan bahwa kerukunan umat beragama tetap terjaga di tengah keragaman masyarakat OKI.

Ketiga, Penguatan Legitimasi: Kemenag OKI tidak lagi dipandang sebagai "menara gading" birokrasi, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang dapat diandalkan. Dengan penguatan legitimasi ini, Kemenag OKI mampu menunjukkan bahwa perannya sangat relevan dan dapat diandalkan dalam berbagai aspek. Misalnya, keterlibatan aktif dalam pembinaan moderasi beragama, fasilitasi dialog antaragama, dan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai keagamaan menunjukkan keterbukaan dan adaptabilitas lembaga terhadap dinamika sosial lokal. Hal ini mengikis kesan birokrasi yang kaku dan jauh sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman berinteraksi serta mengakses layanan Kemenag.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi interaksi sosial di Kemenag Kabupaten OKI bukanlah sekadar aktivitas sampingan, melainkan sebuah strategi inti yang disadari dan dikelola dengan baik. Interaksi yang dibangun, baik internal, eksternal, maupun virtual, telah mentransformasi peran Kemenag dari birokrasi pemerintah yang konvensional menjadi organisasi pelayanan publik yang

adaptif, humanis, dan kontekstual. Nilai-nilai kearifan lokal dan semangat moderasi beragama menjadi roh yang menghidupkan setiap proses interaksi tersebut.

Keberhasilan Kemenag OKI menunjukkan bahwa dalam mengelola urusan agama—yang menyentuh ranah privat dan identitas warga—pendekatan sosio-kultural-religius melalui interaksi sosial yang intensif dan tulus jauh lebih efektif daripada sekadar mengandalkan pendekatan administratif-formal belaka. Interaksi sosial telah menjadi jembatan yang menghubungkan antara negara (dalam hal ini Kemenag) dengan masyarakat, sehingga kebijakan dan layanan yang diberikan tidak hanya *on the track* secara administratif, tetapi juga *in the heart* secara sosiologis. Temuan dari studi kasus di Kemenag OKI ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi instansi pemerintah lainnya, terutama yang bergerak di bidang pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Supriadi, Nurmalina, M. Syahrul Rizal, Rusdial Marta. (2021). Analisis Kemampuan Berbahasa Indonesia Anak Usia 7 Sampai 8 Tahun Di Desa Padang Mutung. Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 1 No 1 Tahun 2021.

- <https://doi.org/10.31004/V1I1.1429>.
- Ahmad Zainuri. (2016). Strategi Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja di Kementerian Agama Menuju Pelayan Prima. Medina-Te, Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Annur, S. (2018). Metodologi penelitian pendidikan (Analisis data kuantitatif dan kualitatif). Noer fikri offset
- Ansar Suherman & Arief Sirajuddin. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Komunal. Jurnal Dialektika, Volume 3, Nomor 2, September 2018. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>.
- Bachri, B. S. (2010). "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". Teknologi Pendidikan
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
- Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. Prentice-Hall.
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. Free Press.
- Ibnu Salman. (2022). Untaian Damai Merajut Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan. JOURNAL OF RELIGIOUS POLICY JURNAL KEBIJAKAN KEAGAMAAN. Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2022. <https://doi.org/10.31330/rep.o.v1i1.2>.
- Kusyana. (2022). Peran Mediasi Dalam Menciptakan Islah Kekeluargaan dari Konflik Paud Bougenville Kenanga. Khulasah : Islamic Studies Journal. Volume: 04 No: 02 Tahun: 2022. <https://doi.org/10.55656/kisj.v4i2.82>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad Harfin Zuhdi. (2018). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok. Mabasan, Vol. 12, No. 1, Januari--Juni 2018. <https://doi.org/10.26499/MA.B.V12I1.34>.
- Muhammad Sauki, Tasrif, Rahmad Hidayat. (2020). Lembaga Adat Dan Fungsionalisasi" Local wisdom" Sebagai Strategi Resolusi Konflik Komunal Di Kabupaten

- Dompu. Jurnal Administrasi Negara Volume. 17No. 2. Desember 2020. DOI: <https://doi.org/10.59050/jia.n.v17i2.122>.
- Nurhaswinda, Syalsa Riski Maulina, Azzahra, Fitri Jannah, Nurwidiatul Jannah, Nurul Aini Fadila, Zalfi Juni Harza, Naufal Hariza Putra. (2025). Penyajian Data. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 3(1), 59–68. <https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709>.
- Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (Eds.). (2009). Building theories of organization: The constitutive role of communication. Routledge
- Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (Eds.). (2009). Building theories of organization: The constitutive role of communication. Routledge.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
- Rizal Mubit. (2016). Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016. <https://doi.org/10.21274/EPIS.2016.11.1.163-184>.
- Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday.
- Trevino, L. K., Lengel, R. H., & Daft, R. L. (1987). Media symbolism, media richness, and media choice in organizations: A symbolic interactionist perspective. Communication Research, 14(5), 553–574.
- Zaenuddin Hudi Prasajo & Mustaqim Pabbajah. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 1, Juni 2020. <https://doi.org/10.30984/AJI.P.V5I1.1131>.